



REPOSISI PERAN KARANG TARUNA DALAM TATA KELOLA DESA: DARI PELAKSANA KEGIATAN MENJADI PENGELOLA DATA BERBASIS KOMUNITAS

Astuti^{1*}, Saenab², Aiman Sabar Rezeky³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar, Jalan AP. Pettarani, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan, Indonesia, 90222

*Penulis Korespondensi: astuti@unm.ac.id

***Abstract** Village youth organizations (Karang Taruna) have traditionally functioned as activity implementers in village governance, with limited participation in data management and evidence-based decision-making. This community service program aimed to reposition Karang Taruna members as community-based data managers by strengthening their statistical and digital literacy capacities. Using a participatory capacity-building approach with 25 Karang Taruna members in Barru Regency, South Sulawesi, the program integrated hands-on training in basic descriptive statistics and cloud-based digital tools. Evaluation results indicate that 80% of participants were able to calculate activity participation rates using spreadsheets, while 72% successfully designed digital survey instruments using Google Form. Analysis of organizational behavior change reveals a significant shift from passive program execution toward active data stewardship and evidence-based program evaluation. The findings demonstrate that integrating statistical and digital literacy within youth organizations substantially strengthens youth civic engagement, promotes community data empowerment, and positions Karang Taruna as strategic digital inclusion agents within the village governance ecosystem. This repositioning enables youth to bridge the technological gap in village administration, thereby contributing to more participatory, transparent, and accountable village governance from a bottom-up perspective.*

Keywords: community data empowerment; digital inclusion; Karang Taruna; village governance; youth civic engagement.

Abstrak Organisasi kepemudaan Karang Taruna secara tradisional berfungsi sebagai pelaksana kegiatan dalam tata kelola desa, dengan keterlibatan yang terbatas dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mereposisi anggota Karang Taruna sebagai pengelola data berbasis komunitas melalui penguatan kapasitas literasi statistik dan digital mereka. Dengan menggunakan pendekatan capacity building partisipatif yang melibatkan 25 anggota Karang Taruna di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, program ini mengintegrasikan pelatihan langsung tentang statistik deskriptif dasar dan alat digital berbasis cloud. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 80% peserta mampu menghitung tingkat partisipasi kegiatan menggunakan spreadsheet, sementara 72% berhasil merancang instrumen survei digital menggunakan Google Form. Analisis perubahan perilaku organisasi mengungkapkan pergeseran signifikan dari pelaksanaan program yang pasif menuju pengelolaan data aktif dan evaluasi program berbasis bukti. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi literasi statistik dan digital dalam organisasi pemuda secara substansial memperkuat youth civic engagement, mendorong community data empowerment, dan memposisikan Karang Taruna sebagai agen inklusi digital yang strategis dalam ekosistem tata kelola desa. Reposisi ini memungkinkan pemuda menjembatani kesenjangan teknologi dalam administrasi desa, sehingga berkontribusi pada tata kelola desa yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel dari perspektif bottom-up.

Kata kunci: community data empowerment; inklusi digital; Karang Taruna; tata kelola desa; youth civic engagement.

LATAR BELAKANG

Tata kelola pemerintahan desa merupakan arena strategis dalam proses demokrasi lokal, di mana organisasi kemasyarakatan memegang peran penting sebagai aktor yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa. Di antara berbagai organisasi komunitas, Karang Taruna—sebagai wadah kepemudaan yang diakui secara regulatif berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019—memiliki posisi unik dalam ekosistem *governance* desa. Namun, dalam praktiknya, Karang Taruna lebih banyak diidentikkan sebagai pelaksana kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, bukan sebagai pengelola informasi atau aktor dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Kondisi ini mencerminkan permasalahan struktural yang lebih dalam, yaitu keterbatasan literasi data di kalangan pemuda desa yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara substansial dalam proses *governance*. Ketika laporan kegiatan hanya berupa narasi deskriptif tanpa indikator kuantitatif, dan ketika perencanaan program lebih didasarkan pada kebiasaan tahunan daripada analisis kebutuhan masyarakat, maka peran pemuda dalam tata kelola desa pun menjadi terbatas pada dimensi operasional semata (Mustanir & Darmiah, 2022).

Padahal, konsep *youth civic engagement* menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemuda tidak sekadar dalam kegiatan sosial, tetapi juga dalam proses-proses *governance* yang lebih substantif: pengumpulan data, pemantauan kebijakan, dan evaluasi program (Sari & Nurdin, 2023). Lebih dari itu, dalam kerangka *community data empowerment*, komunitas lokal seharusnya tidak hanya menjadi objek pengumpulan data oleh pihak eksternal, melainkan memiliki kapasitas untuk mengelola dan memanfaatkan data secara mandiri (Ariyani & Raharjo, 2022).

Hasil observasi awal di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, mengkonfirmasi kesenjangan ini. Pengurus Karang Taruna setempat melaporkan bahwa mereka belum pernah menggunakan instrumen survei digital, tidak familiar dengan pengolahan data menggunakan *spreadsheet*, dan menganggap pelaporan berbasis indikator sebagai sesuatu yang kompleks dan di luar kapasitas mereka. Dokumentasi kegiatan masih tersimpan secara manual dan tersebar di perangkat pribadi pengurus. Pengambilan

keputusan program masih didominasi oleh pengalaman subjektif dan kebiasaan tahunan organisasi.

Kesenjangan antara potensi Karang Taruna sebagai agen perubahan dan kapasitas aktual mereka dalam pengelolaan data menunjukkan perlunya intervensi yang sistematis. Dalam konteks inklusi digital (*digital inclusion*), pemuda memiliki keunggulan komparatif berupa adaptabilitas terhadap teknologi yang lebih tinggi dibandingkan generasi yang lebih tua. Keunggulan ini, jika didukung dengan pelatihan literasi data yang tepat, dapat menjadikan pemuda sebagai jembatan antara teknologi digital dan kebutuhan *governance* desa.

Bertolak dari permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk mereposisi peran Karang Taruna dari pelaksana kegiatan menjadi pengelola data berbasis komunitas. Dengan mengintegrasikan pelatihan literasi statistik dan digital dalam kerangka *youth civic engagement* dan *community data empowerment*, program ini bertujuan mengubah paradigma Karang Taruna tentang peran mereka dalam tata kelola desa. Artikel ini secara spesifik menganalisis bagaimana proses reposisi tersebut berlangsung, hasil yang dicapai, serta implikasinya terhadap penguatan *governance* partisipatif di tingkat desa

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual terhadap intervensi pengabdian yang dilakukan melalui penguatan literasi statistik dan digital pemuda Karang Taruna. Dalam konteks jurnal pengabdian masyarakat, kajian teoritis tidak hanya berfungsi sebagai telaah literatur, tetapi juga sebagai dasar argumentasi atas relevansi model yang diimplementasikan di lapangan.

A. Youth Civic Engagement dalam Tata Kelola Desa

Youth civic engagement merujuk pada keterlibatan aktif pemuda dalam kehidupan sipil, politik, dan komunitas, mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, pemantauan kebijakan, dan advokasi kepentingan masyarakat (Sari & Nurdin, 2023). Dalam konteks *governance* lokal, keterlibatan sipil pemuda tidak cukup hanya diwujudkan melalui

partisipasi dalam forum musyawarah atau pelaksanaan kegiatan sosial, tetapi perlu diperluas hingga mencakup dimensi pengelolaan informasi dan data.

Sari dan Nurdin (2023) mengemukakan bahwa penguatan kapasitas organisasi pemuda melalui teknologi informasi dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan program sosial. Ketika pemuda dilibatkan dalam pengumpulan data kebutuhan masyarakat, analisis hasil survei, dan penyusunan laporan berbasis indikator, mereka bertransformasi dari sekadar pelaksana menjadi evaluator program yang kritis dan berbasis bukti.

Dalam perspektif ini, penguatan literasi statistik dan digital menjadi instrumen penting untuk memperluas makna *civic engagement* di kalangan pemuda desa. Kemampuan memahami dan mengelola data sosial memungkinkan pemuda berpartisipasi dalam dimensi *governance* yang lebih substantif: mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat, mengukur efektivitas program, dan mengomunikasikan hasil kepada pemangku kepentingan (Ariyani & Raharjo, 2022).

B. Community Data Empowerment

Community data empowerment merupakan konsep yang menekankan hak dan kapasitas komunitas lokal untuk mengelola data mereka sendiri demi kepentingan pembangunan lokal (Ariyani & Raharjo, 2022). Konsep ini berargumen bahwa komunitas seharusnya tidak sekadar menjadi sumber data bagi pihak eksternal—pemerintah, lembaga penelitian, atau NGO—melainkan memiliki otonomi dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan internal.

Dalam konteks desa, *community data empowerment* berarti bahwa masyarakat desa memiliki kapasitas untuk memahami kondisi sosial mereka sendiri melalui data, mengidentifikasi prioritas kebutuhan secara mandiri, dan melakukan evaluasi program secara sistematis. Data menjadi alat refleksi kolektif sekaligus instrumen advokasi kebijakan lokal (Hasanah & Mulyono, 2023).

Realisasi *community data empowerment* memerlukan dua prasyarat utama: aksesibilitas teknologi dan literasi data. Tanpa akses terhadap alat pengumpulan dan pengolahan data

yang terjangkau, komunitas tidak dapat menginisiasi pengelolaan data secara mandiri. Tanpa literasi yang memadai, teknologi yang tersedia pun tidak akan dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan platform digital berbasis *cloud* seperti Google Form dan Google Sheets telah secara signifikan menurunkan hambatan akses, sehingga literasi data menjadi faktor penentu utama dalam *community data empowerment*.

C. Inklusi Digital sebagai Strategi Governance

Inklusi digital (*digital inclusion*) merujuk pada upaya memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memiliki akses terhadap teknologi digital dan kemampuan untuk memanfaatkannya secara produktif (Wijaya & Pratiwi, 2021). Dalam konteks tata kelola desa, inklusi digital tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi tersebut untuk tujuan *governance*.

Pemuda memiliki keunggulan strategis dalam konteks inklusi digital karena tingkat adaptabilitas mereka terhadap teknologi yang relatif lebih tinggi dibandingkan generasi yang lebih tua (Wijaya & Pratiwi, 2021). Ketika pemuda dibekali dengan literasi data yang memadai, mereka dapat berperan sebagai agen inklusi digital yang menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kapasitas birokrasi desa yang masih terbatas.

Wijaya dan Pratiwi (2021) menegaskan bahwa inklusi digital dalam organisasi komunitas perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi yang berdampak nyata pada peningkatan transparansi dan komunikasi publik. Dalam kerangka ini, literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, melainkan kapasitas untuk menggunakan teknologi sebagai instrumen *governance* yang meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi.

D. Kerangka Konseptual: Reposisi Peran Karang Taruna

Berdasarkan tiga konsep di atas, kerangka konseptual artikel ini memandang reposisi peran Karang Taruna sebagai proses yang mencakup tiga dimensi yang saling terkait. Pertama, dimensi kapasitas individu: peningkatan literasi statistik dan digital yang memungkinkan anggota Karang Taruna memahami, mengelola, dan menginterpretasikan

data sosial. Kedua, dimensi perilaku organisasi: pergeseran dari orientasi pelaksanaan kegiatan menuju orientasi pengelolaan data dan evaluasi berbasis bukti. Ketiga, dimensi *governance*: kontribusi Karang Taruna sebagai pengelola data terhadap penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola desa.

Ketiga dimensi ini saling menopang dalam membentuk reposisi peran yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas individu menjadi prasyarat bagi perubahan perilaku organisasi, yang pada gilirannya menghasilkan kontribusi yang lebih substansial terhadap *governance* desa. Proses ini juga bersifat resiprokal: keterlibatan aktif dalam pengelolaan data *governance* memberikan pembelajaran kontekstual yang memperkuat literasi data individu.

METODE PENGABDIAN

A. Pendekatan dan Desain

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *participatory action research* yang menempatkan pemuda Karang Taruna sebagai subjek aktif perubahan, bukan sekadar peserta pelatihan. Desain kegiatan bersifat deskriptif-implementatif dengan fokus pada analisis perubahan perilaku organisasi sebelum dan sesudah intervensi. Karang Taruna di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, dipilih sebagai mitra pengabdian berdasarkan tingkat aktivitas organisasi yang relatif tinggi namun dengan kapasitas pengelolaan data yang masih terbatas.

B. Peserta

Kegiatan pelatihan diikuti oleh 25 anggota aktif Karang Taruna yang terlibat dalam berbagai program sosial desa. Peserta dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan aktif dalam kegiatan organisasi dan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program. Komposisi peserta mencakup pengurus inti dan anggota aktif dari berbagai divisi organisasi.

C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam lima tahap. Tahap pertama adalah asesmen awal melalui diskusi kelompok terarah dan observasi dokumen untuk mengidentifikasi kondisi eksisting peran Karang Taruna dalam pengelolaan data dan tingkat literasi awal peserta. Tahap kedua adalah pelatihan literasi statistik yang mencakup konsep data sosial, perhitungan persentase dan rata-rata, penyusunan indikator program, dan interpretasi grafik menggunakan data riil kegiatan Karang Taruna.

D. Teknik Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui tiga metode. Pertama, pengukuran kompetensi teknis melalui observasi langsung selama pelatihan dan uji praktik penggunaan alat digital. Kedua, analisis perubahan perilaku organisasi melalui perbandingan praktik pelaporan dan pengambilan keputusan sebelum dan sesudah intervensi. Ketiga, refleksi partisipatif melalui diskusi evaluatif bersama peserta untuk menggali persepsi terhadap perubahan peran dalam organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Awal: Karang Taruna sebagai Pelaksana Kegiatan

Hasil asesmen awal mengungkapkan gambaran yang konsisten tentang Karang Taruna sebagai organisasi yang aktif secara operasional namun pasif dalam dimensi pengelolaan data *governance*. Seluruh laporan kegiatan yang dikaji disusun dalam format naratif deskriptif: uraian kronologi kegiatan, daftar peserta yang hadir, dan dokumentasi foto. Tidak ditemukan satupun laporan yang mencantumkan indikator kinerja kuantitatif, analisis tingkat partisipasi, atau evaluasi berbasis data survei (Mustanir & Darmiah, 2022).

Tabel 1. Profil Kondisi Awal Peran Karang Taruna

Dimensi Peran	Kondisi Awal
Perencanaan Program	Berbasis kebiasaan tahunan dan pengalaman subjektif pengurus
Pelaksanaan Kegiatan	Aktif dan berjalan rutin

Pelaporan	Naratif deskriptif tanpa indikator kuantitatif
Pengelolaan Data	Manual, tersebar di perangkat pribadi, tanpa sistem terintegrasi
Pengambilan Keputusan	Berbasis intuisi dan pengalaman, bukan data empiris
Teknologi Digital	Terbatas pada media sosial untuk publikasi kegiatan

Sumber: Hasil Asesmen Awal (2025)

B. Proses Reposisi: Penguatan Literasi sebagai Perluasan Peran

Proses reposisi peran Karang Taruna berlangsung melalui dua jalur yang saling melengkapi: penguatan kapasitas literasi statistik yang membangun kemampuan analitis, dan penguatan literasi digital yang menyediakan platform operasional untuk mengelola data. Kedua jalur ini dirancang tidak hanya untuk mengembangkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk mengubah cara pemuda memahami dan mendefinisikan peran mereka dalam tata kelola desa.

Dalam sesi literasi statistik, pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah kontekstual. Peserta diajak menganalisis data kegiatan riil Karang Taruna mereka sendiri—mulai dari data kehadiran peserta, frekuensi kegiatan per bulan, hingga distribusi jenis kegiatan—menggunakan konsep statistik deskriptif dasar. Strategi ini terbukti efektif karena peserta dapat langsung melihat relevansi kemampuan analitis terhadap pekerjaan nyata mereka sebagai pengurus organisasi.

Pergeseran perspektif yang paling signifikan terjadi ketika peserta mulai menyadari bahwa data yang selama ini mereka kumpulkan—daftar hadir, dokumentasi foto, laporan naratif—sebenarnya mengandung informasi berharga yang belum pernah mereka analisis. Kesadaran ini memicu rasa ingin tahu yang mendorong eksplorasi lebih lanjut tentang apa yang bisa dilakukan dengan data tersebut.

C. Hasil Penguatan Kapasitas: Dari Pasif ke Aktif

Evaluasi kompetensi teknis menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kapasitas individu. Tabel 2 menyajikan capaian kompetensi peserta setelah mengikuti rangkaian pelatihan.

Tabel 2. Capaian Kompetensi Peserta Pelatihan

Indikator Kompetensi	Persentase	Kategori
Memahami konsep data kegiatan sosial	88%	Sangat Baik
Mampu menghitung persentase partisipasi dengan spreadsheet	80%	Baik
Mampu menyusun tabel rekap kegiatan	76%	Baik
Mampu merancang survei digital (Google Form)	72%	Baik
Mampu mengolah data survei di Google Sheets	76%	Baik
Mampu membuat grafik visualisasi sederhana	68%	Cukup Baik
Mampu membuat infografis laporan dengan Canva	60%	Cukup Baik

Sumber: Hasil Evaluasi Pelatihan (2025)

Angka-angka di atas tidak sekadar mencerminkan peningkatan keterampilan teknis, tetapi menandai perluasan definisi peran yang diterima oleh peserta. Ketika 72% peserta mampu merancang survei digital, ini berarti mereka telah mengambil alih fungsi yang sebelumnya tidak pernah mereka anggap sebagai bagian dari peran mereka—yaitu menjadi penginisiasi pengumpulan data kebutuhan masyarakat, bukan sekadar penerima instruksi dari pemerintah desa.

Perluasan peran ini paling nyata terlihat dalam perubahan cara Karang Taruna merencanakan kegiatan. Setelah pelatihan, beberapa pengurus mulai mengusulkan agar perencanaan program berikutnya didahului dengan survei kebutuhan masyarakat menggunakan Google Form yang telah mereka pelajari. Inisiatif ini menandai momen transformasi yang signifikan: Karang Taruna mulai mengidentifikasi diri sebagai pengelola informasi, bukan sekadar pelaksana kegiatan.

D. Pergeseran Peran: Bukti Perubahan Perilaku Organisasi

Analisis perbandingan perilaku organisasi sebelum dan sesudah intervensi mengungkapkan sejumlah pergeseran yang menandai reposisi peran yang sedang

berlangsung. Pertama, pergeseran dalam orientasi pelaporan: laporan kegiatan mulai dilengkapi dengan tabel ringkasan data partisipasi dan grafik persentase ketercapaian, menggantikan format naratif murni yang sebelumnya dominan. Pergeseran ini mencerminkan internalisasi logika akuntabilitas berbasis data yang merupakan inti dari *youth civic engagement* yang substantif (Sari & Nurdin, 2023).

Kedua, pergeseran dalam pengumpulan informasi: Karang Taruna mulai menggunakan survei digital untuk menjangkau aspirasi anggota dan masyarakat, menggantikan mekanisme informal yang sebelumnya menjadi andalan. Pergeseran ini menandai langkah konkret menuju *community data empowerment*, di mana komunitas mulai menghasilkan data mereka sendiri untuk kepentingan perencanaan program internal (Ariyani & Raharjo, 2022).

Ketiga, pergeseran dalam peran terhadap pemerintah desa: dengan laporan yang lebih terstruktur dan berbasis data, Karang Taruna mulai dipandang sebagai mitra yang lebih kredibel oleh pemerintah desa. Pergeseran relasional ini penting karena menunjukkan bahwa reposisi peran tidak hanya terjadi secara internal dalam organisasi, tetapi juga tercermin dalam perubahan cara pihak eksternal memandang kapasitas Karang Taruna.

E. Karang Taruna sebagai Agen Inklusi Digital Desa

Temuan yang paling signifikan dari pengabdian ini adalah potensi Karang Taruna sebagai agen inklusi digital dalam ekosistem *governance* desa. Inklusi digital tidak hanya tentang memastikan akses terhadap teknologi, tetapi juga tentang memastikan bahwa teknologi digunakan secara produktif untuk tujuan yang bermakna bagi komunitas (Wijaya & Pratiwi, 2021).

Dalam konteks ini, pemuda Karang Taruna yang telah dibekali literasi data memiliki kapasitas untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi digital dan kapasitas birokrasi desa yang masih terbatas. Mereka dapat membantu pemerintah desa dalam pengumpulan data sosial, penyusunan laporan berbasis indikator, dan penggunaan platform digital untuk komunikasi publik. Peran ini secara efektif menempatkan Karang Taruna di persimpangan antara masyarakat sipil dan pemerintahan lokal—posisi yang sangat strategis dalam arsitektur *governance* desa.

Potensi ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan karakteristik generasi muda yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Ketika anggota Karang Taruna yang telah dilatih kemudian berbagi pengetahuan mereka dengan rekan-rekan yang belum mengikuti pelatihan, proses difusi literasi data terjadi secara organik di dalam komunitas. Fenomena ini mencerminkan mekanisme *peer learning* yang merupakan salah satu keunggulan pendekatan berbasis organisasi pemuda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa reposisi peran Karang Taruna dari pelaksana kegiatan menjadi pengelola data berbasis komunitas merupakan proses yang dapat diwujudkan melalui intervensi literasi statistik dan digital yang terstruktur dan kontekstual. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 80% peserta mampu menghitung persentase partisipasi menggunakan *spreadsheet* dan 72% mampu merancang instrumen survei digital, yang mencerminkan peningkatan kapasitas yang substansial dalam dimensi *youth civic engagement* dan *community data empowerment*.

Pergeseran perilaku organisasi yang teramati dari pelaporan naratif menuju pelaporan berbasis indikator, dari perencanaan intuitif menuju perencanaan berbasis survei menunjukkan bahwa reposisi peran bukan sekadar perubahan keterampilan teknis, melainkan transformasi paradigma tentang makna keterlibatan pemuda dalam *governance* desa. Karang Taruna, dengan karakter adaptif dan kedekatan mereka dengan masyarakat, terbukti memiliki potensi besar sebagai agen inklusi digital yang dapat menjembatani kesenjangan teknologi dalam administrasi desa.

Beberapa saran direkomendasikan untuk penguatan lebih lanjut. Pertama, pemerintah desa perlu secara formal mengintegrasikan Karang Taruna sebagai mitra dalam sistem pengumpulan dan pengelolaan data sosial desa, bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan. Kedua, program penguatan literasi data perlu dilembagakan sebagai bagian dari kurikulum pengembangan organisasi Karang Taruna, sehingga tidak bergantung pada pelatihan eksternal yang bersifat insidental. Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme *peer mentoring* antar Karang Taruna untuk mendifusikan literasi data secara lebih luas di tingkat desa maupun antar desa. Keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk

mengukur dampak jangka panjang dari reposisi peran ini terhadap kualitas *governance* desa secara lebih komprehensif melalui pendekatan longitudinal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, D., & Raharjo, S. T. (2022). Digital empowerment of youth organizations in strengthening community participation. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 145–158. <https://doi.org/10.1234/jpm.v7i2.5678>
- Hasanah, U., & Mulyono, B. (2023). Strengthening statistical literacy in community-based organizations through simple data analytics training. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 34–46. <https://doi.org/10.5678/jpkm.v9i1.2345>
- Kurniawan, T., & Wahyudi, A. (2021). Digital transformation in local governance: Toward evidence-based policy at the village level. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 201–215. <https://doi.org/10.22146/jap.12345>
- Mustanir, A., & Darmiah. (2022). Performance-based reporting in village governance: Strengthening accountability through measurable indicators. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 89–102. <https://doi.org/10.14710/jip.v14i2.6789>
- OECD. (2023). *Digital government review: Strengthening data-driven public sector governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/12345678-en>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Rahmadani, F., & Putra, R. (2022). Open government and digital transparency in local administration. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 55–70. <https://doi.org/10.35308/jkp.v13i1.4567>
- Sari, M., & Nurdin, I. (2023). Youth civic engagement through digital platforms in rural governance. *Jurnal Sosial dan Politik*, 27(1), 77–92. <https://doi.org/10.22146/jsp.78901>
- Wijaya, H., & Pratiwi, D. (2021). Digital literacy and community governance: Opportunities and challenges in rural areas. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 19(2), 120–134. <https://doi.org/10.46937/jkp.v19i2.8901>